

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pemerintah mengenai kemudahan berusaha di Indonesia terkait dengan memulai usaha, akses perkreditan, dan penyelesaian perkara kepailitan, serta untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan memenuhi perkembangan hukum, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5667).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari:
 - a. pelayanan jasa hukum;
 - b. pelayanan harta peninggalan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. pelayanan keimigrasian;
 - e. pelayanan kekayaan intelektual;
 - f. pelayanan kesehatan rumah sakit; dan
 - g. kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.”

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4A

Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kekayaan intelektual

berupa biaya (jasa) tahunan Paten bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka V huruf B nomor 25 huruf a dan nomor 26 huruf a Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4B

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif pada pelayanan kekayaan intelektual bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan persetujuan Menteri Keuangan.”

3. Ketentuan dalam Lampiran angka I mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Jasa Hukum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|--|-----------------|--------------|--------------|
| I. PELAYANAN JASA HUKUM | | | |
| A. BADAN HUKUM | | | |
| 1. Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan | Per Persetujuan | Rp | 100.000,00 |
| 2. Pengesahan Badan Hukum Perseroan | | | |
| a. Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) | Per Permohonan | Rp | 200.000,00 |
| b. Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) | Per Permohonan | Rp | 500.000,00 |
| c. Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) | Per Permohonan | Rp | 1.000.000,00 |
| 3. Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan | | | |
| a. Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) | Per Permohonan | Rp | 300.000,00 |
| b. Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) | Per Permohonan | Rp | 600.000,00 |

| | | | |
|---|------------------------------|----|--------------|
| c. Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) | Per Permohonan | Rp | 1.100.000,00 |
| 4. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan | Per Permohonan | Rp | 1.000.000,00 |
| 5. Informasi Tentang Data Perseroan dalam Daftar Perseroan | Per Permohonan Per Perseroan | Rp | 500.000,00 |
| 6. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak | Per Surat Keputusan | Rp | 1.000.000,00 |

| | | | |
|--|---------------------|----|--------------|
| 7. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak | Per Surat Keputusan | Rp | 1.000.000,00 |
| 8. Pencarian/unduh (<i>search/download</i>) data Perseroan Secara <i>Online</i> | Per Pencarian | Rp | 50.000,00 |
| 9. Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan | Per Permohonan | Rp | 250.000,00 |
| 10. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan | Per Permohonan | Rp | 250.000,00 |
| 11. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Perkumpulan yang Hilang atau Rusak | Per Surat Keputusan | Rp | 250.000,00 |
| 12. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang Hilang atau Rusak | Per Surat Keputusan | Rp | 250.000,00 |
| 13. Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan | Per Persetujuan | Rp | 100.000,00 |
| 14. Pengesahan Akta Pendirian Yayasan | Per Permohonan | Rp | 250.000,00 |
| 15. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan | Per Permohonan | Rp | 250.000,00 |
| 16. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan | Per Permohonan | Rp | 100.000,00 |
| 17. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Yayasan yang Hilang atau Rusak | Per Surat Keputusan | Rp | 250.000,00 |
| 18. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang Hilang atau Rusak | Per Surat Keputusan | Rp | 250.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|--|---------------------|--------------|----------------|
| 19. Pencarian/unduh (<i>search/download</i>) data Yayasan Secara <i>Online</i> | Per Pencarian | Rp | 50.000,00 |
| B. PERDATA UMUM | | | |
| 1. Pemberian Salinan Keputusan Menteri yang Berkaitan dengan Hukum Perorangan yaitu Perizinan, Perubahan, atau Penambahan Nama Keluarga yang Hilang atau Rusak | Per Surat Keputusan | Rp | 150.000,00 |
| 2. Legalisasi Tanda Tangan yang Tercantum dalam Dokumen | Per Dokumen | Rp | 25.000,00 |
| 3. Persetujuan Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing yang Dipekerjakan pada Kantor Konsultan Hukum Indonesia | Per Orang Per Tahun | Rp | 1.000.000,00 |
| 4. Persetujuan Perpanjangan Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing yang Dipekerjakan pada Kantor Konsultan Hukum Indonesia | Per Orang Per Tahun | Rp | 1.000.000,00 |
| C. NOTARIAT | | | |
| 1. Pengangkatan Notaris | | | |
| a. Provinsi DKI Jakarta | | | |
| 1) Kota Administrasi Jakarta Selatan | Per Orang | Rp | 100.000.000,00 |
| 2) Kota Administrasi Jakarta Barat | Per Orang | Rp | 100.000.000,00 |
| 3) Kota Administrasi Jakarta Pusat | Per Orang | Rp | 100.000.000,00 |
| 4) Kota Administrasi Jakarta Utara | Per Orang | Rp | 100.000.000,00 |
| 5) Kota Administrasi Jakarta Timur | Per Orang | Rp | 100.000.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|--|---------------|--------------|---------------|
| b. Provinsi Jawa Barat | | | |
| 1) Kota Bandung | Per Orang | Rp | 50.000.000,00 |
| 2) Kota Bekasi | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 3) Kabupaten Bekasi | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 4) Kota Depok | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 5) Kota Bogor | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 6) Kabupaten Bogor | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| c. Provinsi Banten | | | |
| 1) Kota Tangerang | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 2) Kota Tangerang Selatan | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 3) Kabupaten Tangerang | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| d. Provinsi Jawa Timur | | | |
| 1) Kota Surabaya | Per Orang | Rp | 50.000.000,00 |
| 2) Kabupaten Sidoarjo | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| e. Provinsi DI Yogyakarta | | | |
| 1) Kota Yogyakarta | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 2) Kabupaten Sleman | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 3) Kabupaten Bantul | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| f. Provinsi Jawa Tengah | | | |
| 1) Kota Semarang | Per Orang | Rp | 50.000.000,00 |
| 2) Kota Surakarta | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|--|---------------|--------------|----------------|
| g. Provinsi Sumatera Utara | | | |
| 1) Kota Medan | Per Orang | Rp | 50.000.000,00 |
| 2) Kabupaten Deli Serdang | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| h. Provinsi Sulawesi Selatan | | | |
| 1) Kota Makassar | Per Orang | Rp | 50.000.000,00 |
| 2) Kabupaten Gowa | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| i. Kota Batam | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| j. Kota Pekanbaru | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| k. Provinsi Bali | | | |
| 1) Kota Denpasar | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 2) Kabupaten Badung | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 3) Kabupaten Gianyar | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 2. Pengangkatan Notaris dengan Wilayah Kerja di Luar Kota-Kota yang Tersebut dalam Huruf a sampai dengan Huruf k | Per Orang | Rp | 1.000.000,00 |
| 3. Pengangkatan Notaris Pindahan | | | |
| a. Provinsi DKI Jakarta | | | |
| 1) Kota Administrasi Jakarta Selatan | Per Orang | Rp | 100.000.000,00 |
| 2) Kota Administrasi Jakarta Barat | Per Orang | Rp | 100.000.000,00 |
| 3) Kota Administrasi Jakarta Pusat | Per Orang | Rp | 100.000.000,00 |
| 4) Kota Administrasi Jakarta Utara | Per Orang | Rp | 100.000.000,00 |
| 5) Kota Administrasi Jakarta Timur | Per Orang | Rp | 100.000.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|--|---------------|--------------|---------------|
| b. Provinsi Jawa Barat | | | |
| 1) Kota Bandung | Per Orang | Rp | 50.000.000,00 |
| 2) Kota Bekasi | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 3) Kabupaten Bekasi | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 4) Kota Depok | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 5) Kota Bogor | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 6) Kabupaten Bogor | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| c. Provinsi Banten | | | |
| 1) Kota Tangerang | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 2) Kota Tangerang Selatan | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 3) Kabupaten Tangerang | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| d. Provinsi Jawa Timur | | | |
| 1) Kota Surabaya | Per Orang | Rp | 50.000.000,00 |
| 2) Kabupaten Sidoarjo | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| e. Provinsi DI Yogyakarta | | | |
| 1) Kota Yogyakarta | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 2) Kabupaten Sleman | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 3) Kabupaten Bantul | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| f. Provinsi Jawa Tengah | | | |
| 1) Kota Semarang | Per Orang | Rp | 50.000.000,00 |
| 2) Kota Surakarta | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|---|---------------|--------------|---------------|
| g. Provinsi Sumatera Utara | | | |
| 1) Kota Medan | Per Orang | Rp | 50.000.000,00 |
| 2) Kabupaten Deli Serdang | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| h. Provinsi Sulawesi Selatan | | | |
| 1) Kota Makassar | Per Orang | Rp | 50.000.000,00 |
| 2) Kabupaten Gowa | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| i. Kota Batam | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| j. Kota Pekanbaru | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| k. Provinsi Bali | | | |
| 1) Kota Denpasar | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 2) Kabupaten Badung | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 3) Kabupaten Gianyar | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 4. Pengangkatan Notaris Pindahan dengan Wilayah Kerja di Luar Kota-Kota yang Tersebut dalam Huruf a sampai dengan Huruf k | Per Orang | Rp | 1.500.000,00 |
| 5. Pemberian Penggantian Surat Keputusan Menteri Tentang Pengangkatan Notaris Karena Hilang Atau Rusak | Per Orang | Rp | 1.000.000,00 |
| 6. Perpanjangan Masa Jabatan Notaris | | | |
| a. Provinsi DKI Jakarta | | | |
| 1) Kota Administrasi Jakarta Selatan | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 2) Kota Administrasi Jakarta Barat | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 3) Kota Administrasi Jakarta Pusat | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|--|---------------|--------------|---------------|
| 4) Kota Administrasi Jakarta Utara | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 5) Kota Administrasi Jakarta Timur | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| b. Provinsi Jawa Barat | | | |
| 1) Kota Bandung | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 2) Kota Bekasi | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |
| 3) Kabupaten Bekasi | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |
| 4) Kota Depok | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |
| 5) Kota Bogor | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |
| 6) Kabupaten Bogor | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |
| c. Provinsi Banten | | | |
| 1) Kota Tangerang | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |
| 2) Kota Tangerang Selatan | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |
| 3) Kabupaten Tangerang | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |
| d. Provinsi Jawa Timur | | | |
| 1) Kota Surabaya | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |
| 2) Kabupaten Sidoarjo | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |
| e. Provinsi DI Yogyakarta | | | |
| 1) Kota Yogyakarta | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |
| 2) Kabupaten Sleman | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |
| 3) Kabupaten Bantul | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |
| f. Provinsi Jawa Tengah | | | |
| 1) Kota Semarang | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 2) Kota Surakarta | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|---|---------------|--------------|---------------|
| g. Provinsi Sumatera Utara | | | |
| 1) Kota Medan | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 2) Kabupaten Deli Serdang | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |
| h. Provinsi Sulawesi Selatan | | | |
| 1) Kota Makassar | Per Orang | Rp | 25.000.000,00 |
| 2) Kabupaten Gowa | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |
| i. Kota Batam | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |
| j. Kota Pekanbaru | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |
| k. Provinsi Bali | | | |
| 1) Kota Denpasar | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |
| 2) Kabupaten Badung | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |
| 3) Kabupaten Gianyar | Per Orang | Rp | 15.000.000,00 |
| 7. Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dengan Wilayah Kerja di Luar Kota-Kota yang Tersebut dalam Huruf a sampai dengan Huruf k | Per Orang | Rp | 7.500.000,00 |
| 8. Persetujuan Perubahan Data (Nama, Gelar, dan Alamat Kantor) Notaris | Per Orang | Rp | 250.000,00 |
| 9. Pelantikan dan Penyempahan Notaris Baru/Notaris Pengganti | Per Orang | Rp | 2.500.000,00 |
| 10. Pelantikan dan Penyempahan Notaris Pindahan | Per Orang | Rp | 2.500.000,00 |
| 11. Penerbitan Sertifikat Blanko Cuti Jabatan Notaris | Per Orang | RP | 250.000,00 |
| 12. Pencarian/unduh (search/download) data Protokol Notaris Secara Online | Per Pencarian | Rp | 50.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|---|-----------------------------|-------|---------------|
| D. HARTA PENINGGALAN | | | |
| 1. Pendaftaran Wasiat Secara <i>Online</i> | Per Pendaftaran | Rp | 100.000,00 |
| 2. Pemberian Surat Keterangan Surat Wasiat | Per Surat Keterangan Wasiat | Rp | 250.000,00 |
| 3. Pemberian Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus | Per Orang Per 5 Tahun | Rp | 5.000.000,00 |
| 4. Persetujuan Perpanjangan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus | Per Orang Per 5 Tahun | Rp | 10.000.000,00 |
| 5. Pemberian Salinan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus yang Hilang atau Rusak | Per Orang | Rp | 5.000.000,00 |
| E. FIDUSIA | | | |
| 1. Pendaftaran Jaminan Fidusia | | | |
| a. Untuk Nilai Penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) | Per Sertifikat | Rp | 50.000,00 |
| b. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) | Per Sertifikat | Rp | 100.000,00 |
| c. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) | Per Sertifikat | Rp | 200.000,00 |
| d. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) | Per Sertifikat | Rp | 450.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | | TARIF |
|---|----------------|----|---------------|
| e. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) | Per Sertifikat | Rp | 850.000,00 |
| f. Untuk Penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) | Per Sertifikat | Rp | 1.800.000,00 |
| g. Untuk Penjaminan di atas Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah). | Per Sertifikat | Rp | 3.500.000,00 |
| h. Untuk Penjaminan di atas Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah) | Per Sertifikat | Rp | 6.800.000,00 |
| i. Untuk Penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah) | Per Sertifikat | Rp | 13.300.000,00 |
| 2. Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia | Per Permohonan | Rp | 250.000,00 |
| 3. Pencarian/unduh (<i>search/download</i>) data Fidusia Secara <i>Online</i> | Per Pencarian | Rp | 50.000,00 |
| 4. Perbaikan data fidusia sesuai Akta yang bukan merupakan nilai nominal jaminan | Per Permohonan | Rp | 50.000,00 |
| F. PENGAMBILAN SIDIK JARI UNTUK DIRUMUS | | | |
| 1. Pemberian Keterangan Rumusan dan Identifikasi Sidik Jari Secara Elektronik atau Non Elektronik | Per Orang | Rp | 50.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|--|----------------|--------------|---------------|
| 2. Permintaan Perumusan Sidik Jari yang Insidentil | Per Orang | Rp | 50.000,00 |
| G. PARTAI POLITIK | | | |
| 1. Pengesahan Badan Hukum Partai Politik | Per Permohonan | Rp | 50.000.000,00 |
| 2. Perubahan Kepengurusan Partai Politik | Per Permohonan | Rp | 5.000.000,00 |
| 3. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik | Per Permohonan | Rp | 5.000.000,00 |
| 4. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Partai Politik yang Hilang atau Rusak | Per Permohonan | Rp | 5.000.000,00 |
| 5. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik yang Hilang atau Rusak | Per Permohonan | Rp | 5.000.000,00 |
| 6. Pencarian/unduh (<i>search/download</i>) data Pengurus Partai Politik Secara <i>Online</i> | Per Pencarian | Rp | 50.000,00 |
| H. KEWARGANEGARAAN | | | |
| 1. Pewarganegaraan/Naturalisasi Berdasarkan Permohonan Warga Negara Asing | Per Permohonan | Rp | 50.000.000,00 |
| 2. Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan | Per Permohonan | Rp | 2.500.000,00 |
| 3. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak atau Hilang | Per Permohonan | Rp | 1.000.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|---|----------------|--------------|--------------|
| 4. Permohonan untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campuran | Per Permohonan | Rp | 1.000.000,00 |
| 5. Permohonan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campuran | Per Permohonan | Rp | 1.000.000,00 |
| 6. Pewarganegaraan Bagi Orang Asing yang Telah Berjasa Kepada Negara atau Dengan Alasan untuk Kepentingan Negara | Per Permohonan | Rp | 2.500.000,00 |
| 7. Permohonan Memilih Kewarganegaraan RI Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda | Per Permohonan | Rp | 1.000.000,00 |
| 8. Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Menyatakan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda | Per Permohonan | Rp | 1.000.000,00 |
| 9. Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia | Per Permohonan | Rp | 750.000,00 |
| 10. Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia | Per Permohonan | Rp | 1.000.000,00 |
| 11. Surat Keterangan tentang Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia | Per Permohonan | Rp | 500.000,00 |
| 12. Pencarian/unduh (<i>search/download</i>) data Kewarganegaraan Secara <i>Online</i> | Per Pencarian | Rp | 50.000,00 |
| I. PENCARIAN/UNDUH (<i>SEARCH/DOWNLOAD</i>) DATA PPNS SECARA <i>ONLINE</i> | Per Pencarian | Rp | 50.000,00 |

4. Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Harta Peninggalan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|------------------|---------------|
| II. PELAYANAN HARTA PENINGGALAN | | |
| A. PEMBERIAN BERITA ACARA DAN SALINAN SURAT | | |
| 1. Berita Acara Penyempahan | Per Berita Acara | Rp 50.000,00 |
| 2. Pembuatan Berita Acara Kehamilan | Per Permohonan | Rp 50.000,00 |
| 3. Salinan Surat | | |
| a. Berita Acara Penghadapan | Per Lembar | Rp 10.000,00 |
| b. Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan/Harta Persekutuan, Harta Kekayaan | Per Lembar | Rp 10.000,00 |
| c. Berita Acara Pembuatan Penyempahan | Per Lembar | Rp 10.000,00 |
| d. Surat Keterangan Hak Waris | Per Lembar | Rp 10.000,00 |
| B. PENDAFTARAN AKTA WASIAT | Per Akta | Rp 100.000,00 |
| C. BERITA ACARA PEMBUKAAN DAN PEMBACAAN WASIAT TERTUTUP/RAHASIA | Per Wasiat | Rp 250.000,00 |
| D. PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS | Per Surat | Rp 100.000,00 |
| E. SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN KEPADA WALI/PENGAMPU UNTUK MENJUAL HARTA PENINGGALAN/KEKAYAAN | Per Surat | Rp 100.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|--|
| F. PENJUALAN DAN PENYELESAIAN HARTA KEKAYAAN KETIDAKHADIRAN, TIDAK TERURUS, DAN KEPAILITAN | | |
| 1. Penjualan Harta Kekayaan | | |
| a. Barang Tetap | Per Budel | Rp 2,5 % Dari Hasil Penjualan |
| b. Barang Bergerak | Per Budel | Rp 2,5 % Dari Hasil Penjualan |
| 2. Penyelesaian Harta Kekayaan Solvent Dalam Hal | | |
| a. Balai Harta Peninggalan Selaku Pelaksana (Wali Sementara, Harta Tak Terurus) | Per Budel | Rp 7 % Dari Jumlah Harta Peninggalan |
| b. Ketidakhadiran | Per Budel | Rp 7 % Dari Jumlah Harta Kekayaan |
| c. Balai Harta Peninggalan Selaku Pengurus dan Pengelola Harta Kekayaan Ketidakhadiran dan Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Pengurusan Berakhir Sebelum Batas Waktu Penyelesaian | Per Budel | Rp 3,5% Dari Jumlah Seluruh Kekayaan/ Harta Peninggalan |
| d. Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas | Per Budel | Rp 3,75 % Dari Jumlah Seluruh Harta Peninggalan Dan 1,5 % Dari Jumlah Hutang Peninggalan |
| e. Dalam Hal Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas dan Pengurusan Berakhir Sebelum Waktunya. | Per Budel | Rp 2 % Dari Jumlah Kekayaan |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|--|
| G. PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN DALAM PENGELOLAAN BALAI HARTA PENINGGALAN | | |
| 1. Dalam Hal Balai Harta Peninggalan Selaku Pelaksana | Per Budel | Rp 0,25 % Dari Kekayaan Per Bulan |
| 2. Dalam Hal Pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan Selaku Pelaksana Selesai Sebelum Berakhirnya Tahun Takwim. | Per Budel | Rp 0,35 % Dari Kekayaan |
| 3. Dalam Hal Balai Harta Peninggalan Selaku Pengampu Pengawas | Per Budel | Rp 0,5 % Dari Kekayaan Pertahun Takwim |
| 4. Dalam Hal Pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan Selaku Pengampu Pengawas Selesai Sebelum Berakhirnya Tahun Takwim. | Per Budel | Rp 0,25 % Dari Kekayaan |
| H. KEPAILITAN | | |
| 1. Dalam Hal Kepailitan Berakhir dengan Perdamaian | | |
| a. Nilai utang sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) | Per Budel | Rp 5 % Dari nilai utang yang harus dibayar |
| b. Nilai utang di atas Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar) s.d. Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus lima Puluh Miliar Rupiah) | Per Budel | Rp 3 % Dari nilai utang yang harus dibayar |
| c. Nilai utang di atas Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus lima Puluh Miliar Rupiah) s.d. Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) | Per Budel | Rp 2 % Dari nilai utang yang harus dibayar |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|-----------|---|
| d. Nilai utang di atas Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) | Per Budel | Rp 1 % Dari nilai utang yang harus dibayar |
| 2. Dalam Hal Kepailitan Berakhir Dengan Pemberesan: | | |
| a. Nilai Hasil Pemberesan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) | Per Budel | Rp 8 % dari nilai hasil pemberesan di luar utang |
| b. Nilai Hasil Pemberesan di atas Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar) s.d. Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus lima Puluh Miliar Rupiah) | Per Budel | Rp 6 % dari nilai hasil pemberesan di luar utang |
| c. Nilai Hasil Pemberesan di atas Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus lima Puluh Miliar Rupiah) s.d. Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) | Per Budel | Rp 4 % dari nilai hasil pemberesan di luar utang |
| d. Nilai Hasil Pemberesan di atas Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) | Per Budel | Rp 2 % dari nilai hasil pemberesan di luar utang |
| 3. Dalam Hal Pernyataan Pailit Ditolak di Tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) | Per Budel | Rp 1 % dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1% dari tagihan apabila kreditur sebagai pemohon |

5. Ketentuan dalam Lampiran angka IV mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Keimigrasian diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|----------|---------------|
| IV. PELAYANAN KEIMIGRASIAN | | |
| A. DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA | | |
| 1. Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI | Per Buku | Rp 300.000,00 |
| 2. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 48 Halaman untuk WNI | Per Buku | Rp 600.000,00 |
| 3. Paspor Biasa 24 Halaman untuk WNI | Per Buku | Rp 100.000,00 |
| 4. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 24 Halaman untuk WNI | Per Buku | Rp 350.000,00 |
| 5. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI Perorangan | Per Buku | Rp 50.000,00 |
| 6. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI Dua Orang atau Lebih | Per Buku | Rp 100.000,00 |
| 7. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing | Per Buku | Rp 100.000,00 |
| 8. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku | Per Buku | Rp 200.000,00 |
| 9. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku | Per Buku | Rp 100.000,00 |
| 10. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 24 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku | Per Buku | Rp 800.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|----------|-----------------|
| 11. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 24 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku | Per Buku | Rp 350.000,00 |
| 12. Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku | Per Buku | Rp 600.000,00 |
| 13. Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku | Per Buku | Rp 300.000,00 |
| 14. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 48 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku | Per Buku | Rp 1.200.000,00 |
| 15. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 48 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku | Per Buku | Rp 600.000,00 |
| 16. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kapalnya Tenggelam | Per Buku | Rp 100.000,00 |
| 17. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 24 Halaman Pengganti yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kapalnya Tenggelam | Per Buku | Rp 350.000,00 |
| 18. Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kapalnya Tenggelam | Per Buku | Rp 300.000,00 |
| 19. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 48 Halaman Pengganti Yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kapalnya Tenggelam | Per Buku | Rp 600.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|---|-----------|-------|------------|
| 20. Pas Lintas Batas Perorangan | Per Buku | Rp | 0,00 |
| 21. Pas Lintas Batas Keluarga | Per Buku | Rp | 0,00 |
| B. VISA | | | |
| 1. Visa Kunjungan | Per Orang | US\$ | 50.00 |
| 2. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung Per Tahun | Per Orang | US\$ | 110.00 |
| 3. Visa Kunjungan Saat Kedatangan | | | |
| a. Masa Berlaku 7 (Tujuh) Hari Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | Per Orang | US\$ | 15.00 |
| b. 30 (Tiga Puluh) Hari | Per Orang | US\$ | 35.00 |
| 4. Visa Tinggal Terbatas | | | |
| a. Paling Lama 6 (Enam) Bulan | Per Orang | US\$ | 55.00 |
| b. 1 (Satu) Tahun | Per Orang | US\$ | 105.00 |
| c. 2 (Dua) Tahun | Per Orang | US\$ | 180.00 |
| d. Paling Lama 5 (Lima) Tahun, khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | Per Orang | US\$ | 250.00 |
| 5. Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan untuk 30 (Tiga Puluh) Hari | Per Orang | Rp | 700.000,00 |
| 6. Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri | Per Orang | Rp | 100.000,00 |
| C. IZIN KEIMIGRASIAN | | | |
| 1. Izin Kunjungan dan Perpanjangan Izin Kunjungan | | | |
| a. Pemberian Izin Kunjungan | Per Orang | Rp | 300.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|-----------------|
| b. Setiap Kali Perpanjangan Izin Kunjungan | Per Orang | Rp 300.000,00 |
| 2. Izin Tinggal Terbatas | | |
| a. Saat Kedatangan | Per Orang | Rp 450.000,00 |
| b. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan | Per Orang | Rp 450.000,00 |
| c. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan | Per Orang | Rp 650.000,00 |
| d. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun | Per Orang | Rp 800.000,00 |
| e. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun | Per Orang | Rp 1.000.000,00 |
| f. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun | Per Orang | Rp 1.400.000,00 |
| g. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun | Per Orang | Rp 1.600.000,00 |
| h. Izin Tinggal Terbatas Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun | Per Orang | Rp 3.500.000,00 |
| 3. Setiap Kali Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas | | |
| a. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan | Per Orang | Rp 450.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|-----------------|
| b. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan | Per Orang | Rp 650.000,00 |
| c. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun | Per Orang | Rp 800.000,00 |
| d. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun | Per Orang | Rp 1.000.000,00 |
| e. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun | Per Orang | Rp 1.400.000,00 |
| f. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun | Per Orang | Rp 1.600.000,00 |
| 4. Penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas Karena Rusak atau Hilang dan Masih Berlaku | | |
| a. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan | Per Orang | Rp 900.000,00 |
| b. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan | Per Orang | Rp 1.100.000,00 |
| c. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun | Per Orang | Rp 1.800.000,00 |
| d. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun | Per Orang | Rp 2.000.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|------------------|
| e. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun | Per Orang | Rp 2.800.000,00 |
| f. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun | Per Orang | Rp 3.000.000,00 |
| 5. Izin Tinggal Terbatas untuk Pekerja di Perairan Indonesia, Perpanjangan, Penggantian, dan Penambahan Masa Berlakunya | Per Orang | Rp 700.000,00 |
| 6. Teraan Pemberian Izin Tinggal Terbatas untuk Pekerja di Perairan Indonesia, Perpanjangan, Penggantian, dan Penambahan Masa Berlakunya Pada Kantor Imigrasi | Per Orang | Rp 150.000,00 |
| 7. Izin Tinggal Tetap Non Elektronik Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun | Per Orang | Rp 3.500.000,00 |
| 8. Izin Tinggal Tetap Elektronik (E-KITAP) Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun | Per Orang | Rp 3.700.000,00 |
| 9. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Non Elektronik untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas | Per Orang | Rp 10.000.000,00 |
| 10. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Elektronik (E-KITAP) untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas | Per Orang | Rp 10.200.000,00 |
| 11. Penggantian Izin Tinggal Tetap Non Elektronik Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Karena Rusak atau Hilang dan Masih Berlaku | Per Orang | Rp 1.500.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|---|-----------|-------|--------------|
| 12. Penggantian Izin Tinggal Tetap Elektronik (E-KITAP) Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Karena Rusak atau Hilang dan Masih Berlaku | Per Orang | Rp | 1.700.000,00 |
| 13. Penggantian Izin Tinggal Tetap Non Elektronik Untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas Karena Rusak atau Hilang | Per Orang | Rp | 3.000.000,00 |
| 14. Penggantian Izin Tinggal Tetap Elektronik (E-KITAP) untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas Karena Rusak atau Hilang | Per Orang | Rp | 3.200.000,00 |
| D. IZIN MASUK KEMBALI (RE-ENTRY PERMIT) | | | |
| 1. Izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan tidak lebih dari 6 (enam) bulan | Per Orang | Rp | 600.000,00 |
| 2. Izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun | Per Orang | Rp | 1.000.000,00 |
| 3. Izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak lebih dari 2 (dua) tahun | Per Orang | Rp | 1.750.000,00 |
| 4. Izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak lebih dari 5 (lima) tahun pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | Per Orang | Rp | 3.250.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|-----------------|------------------|
| E. BIAYA BEBAN | | |
| 1. Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia Melampaui Waktu Tidak Lebih Dari 60 (Enam Puluh) Hari Dari Izin Keimigrasian yang Diberikan, Dihitung Per Hari | Per Hari | Rp 300.000,00 |
| 2. Penanggungjawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian | Per Alat Angkut | Rp 50.000.000,00 |
| F. SMART CARD | Per Orang | Rp 350.000,00 |
| G. KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (KPP APEC)/ APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC) | Per Orang | Rp 2.500.000,00 |
| H. KPP APEC PENGGANTI YANG HILANG/RUSAK YANG MASIH BERLAKU DISEBABKAN KARENA KELALAIAN | Per Orang | Rp 3.000.000,00 |
| I. FASILITAS KEIMIGRASIAN (AFFIDAVIT) BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA NON ELEKTRONIK | Per Orang | Rp 150.000,00 |
| J. FASILITAS KEIMIGRASIAN (AFFIDAVIT) BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA ELEKTRONIK | Per Orang | Rp 350.000,00 |
| K. SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN | Per Orang | Rp 3.000.000,00 |
| L. JASA PENGGUNAAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN | Per Permohonan | Rp 55.000,00 |

6. Ketentuan dalam Lampiran angka V mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Kekayaan Intelektual diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|----------------|---------------|
| V. PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL | | |
| A. HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI | | |
| 1. Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan | | |
| a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | |
| 1) Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | Rp 200.000,00 |
| 2) Secara Non Elektronik (manual) | Per Permohonan | Rp 250.000,00 |
| b. Umum | | |
| 1) Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | Rp 400.000,00 |
| 2) Secara Non Elektronik (manual) | Per Permohonan | Rp 500.000,00 |
| 2. Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan Berupa Program Komputer | | |
| a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | |
| 1) Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | Rp 300.000,00 |
| 2) Secara Non Elektronik (manual) | Per Permohonan | Rp 350.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|---|--------------------------|-------|------------|
| b. Umum | | | |
| 1) Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | Rp | 600.000,00 |
| 2) Secara Non Elektronik (manual) | Per Permohonan | Rp | 700.000,00 |
| 3. Permohonan Pencatatan Pemindahan Hak atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar Dalam Daftar Umum Ciptaan. | Per Nomor Daftar | Rp | 150.000,00 |
| 4. Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar Dalam Daftar Umum Ciptaan. | Per Nomor Daftar | Rp | 100.000,00 |
| 5. Permohonan Petikan Tiap Pendaftaran Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan. | Per Nomor Daftar | Rp | 100.000,00 |
| 6. Permohonan Salinan Surat Pendaftaran Hak Cipta | Per Nomor Daftar | Rp | 100.000,00 |
| 7. Pencatatan Lisensi Hak Cipta. | Per Nomor Daftar | Rp | 100.000,00 |
| 8. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar | Per Permohonan | Rp | 100.000,00 |
| 9. Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan | Per Permohonan Hak Cipta | Rp | 100.000,00 |
| 10. Koreksi Surat Pendaftaran Ciptaan atas Kesalahan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan yang Disampaikan oleh Pemohon. | Per Nomor Daftar | Rp | 100.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|----------------|-----------------|
| 11. Permohonan Pendaftaran Desain Industri | | |
| a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | |
| 1) Secara Elektronik (<i>online</i>) | | |
| a) Satu Desain industri | Per Permohonan | Rp 250.000,00 |
| b) Satu Kesatuan Desain (Set) | Per Permohonan | Rp 550.000,00 |
| 2) Secara Non Elektronik (Manual) | | |
| a) Satu Desain industri | Per Permohonan | Rp 300.000,00 |
| b) Satu Kesatuan Desain (Set) | Per Permohonan | Rp 600.000,00 |
| b. Umum | | |
| 1) Secara Elektronik (<i>online</i>) | | |
| a) Satu Desain industri | Per Permohonan | Rp 800.000,00 |
| b) Satu Kesatuan Desain (Set) | Per Permohonan | Rp 1.250.000,00 |
| 2) Secara Non Elektronik (Manual) | | |
| a) Satu Desain industri | Per Permohonan | Rp 1.000.000,00 |
| b) Satu Kesatuan Desain (Set) | Per Permohonan | Rp 1.500.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|--|--------------------------------|-------|------------|
| 12. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri yang Diumumkan | | | |
| a. UMKM | Per Permohonan | Rp | 150.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan | Rp | 500.000,00 |
| 13. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri | Per Permohonan | Rp | 150.000,00 |
| 14. Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri | Per Permohonan Desain Industri | Rp | 150.000,00 |
| 15. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri | Per Sertifikat | Rp | 150.000,00 |
| 16. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri | | | |
| a. UMKM | Per Nomor Daftar | Rp | 200.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Nomor Daftar | Rp | 550.000,00 |
| 17. Pencatatan Surat Perjanjian Lisensi Desain Industri. | Per Nomor Daftar | Rp | 350.000,00 |
| 18. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri | | | |
| a. UMKM | Per Nomor Daftar | Rp | 100.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Nomor Daftar | Rp | 200.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|--------------------------------|---------------|
| 19. Pembatalan Desain Industri | | |
| a. UMKM | Per Permohonan | Rp 0,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan | Rp 200.000,00 |
| 20. Pengajuan Keberatan atas Putusan Penolakan Permohonan Desain Industri yang Ditolak Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 | | |
| a. UMKM | Per Permohonan Desain Industri | Rp 200.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan Desain Industri | Rp 400.000,00 |
| 21. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Desain Industri Terdaftar | Per Nomor Daftar | Rp 200.000,00 |
| 22. Permohonan Perbaikan Data Permohonan Desain Industri | Per Nomor Daftar | Rp 200.000,00 |
| 23. Koreksi Sertifikat Pendaftaran Desain Industri atas Kesalahan Data Permohonan Pendaftaran Desain Industri yang Disampaikan Pemohon | Per Nomor Daftar | Rp 400.000,00 |
| B. PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG | | |
| 1. Permohonan | | |
| a. Permohonan Paten | | |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|----------------|-----------------|
| 1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah | | |
| a) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Permohonan | Rp 350.000,00 |
| b) Secara non Elektronik (<i>manual</i>) | Per Permohonan | Rp 450.000,00 |
| 2) Umum | | |
| a) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Permohonan | Rp 1.250.000,00 |
| b) Secara non Elektronik (<i>manual</i>) | Per Permohonan | Rp 1.500.000,00 |
| b. Permohonan Paten Sederhana | | |
| 1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah | | |
| a) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Permohonan | Rp 200.000,00 |
| b) Secara non Elektronik (<i>manual</i>) | Per Permohonan | Rp 250.000,00 |
| 2) Umum | | |
| a) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Permohonan | Rp 800.000,00 |
| b) Secara non Elektronik (<i>manual</i>) | Per Permohonan | Rp 1.250.000,00 |
| 2. Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang Lebih Dari 30 (Tiga Puluh) Halaman | Per Lembar | Rp 5.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|---|----------------|-------|--------------|
| 3. Tambahan Biaya Setiap Klaim | Per Klaim | Rp | 50.000,00 |
| 4. Denda Terhadap Keterlambatan Pemenuhan Persyaratan Permohonan | Per Permohonan | Rp | 200.000,00 |
| 5. Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6 (enam) Bulan | Per Permohonan | Rp | 200.000,00 |
| 6. Permohonan Perubahan Data Permohonan | Per Permohonan | Rp | 100.000,00 |
| 7. Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu | Per Permohonan | Rp | 3.000.000,00 |
| 8. Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas | Per Permohonan | Rp | 250.000,00 |
| 9. Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik | Per Permohonan | Rp | 100.000,00 |
| 10. Pemeriksaan Substantif | | | |
| a. Permohonan Paten | Per Permohonan | Rp | 2.000.000,00 |
| b. Permohonan Paten Sederhana | Per Permohonan | Rp | 350.000,00 |
| 11. Perubahan Jenis Permohonan Paten | Per Permohonan | Rp | 450.000,00 |
| 12. Permohonan Banding | Per Permohonan | Rp | 3.000.000,00 |
| 13. Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Aplikasi yang Disampaikan oleh Pemohon | Per Permohonan | Rp | 500.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | | TARIF |
|--|----------------|----|--------------|
| 14. Koreksi <i>Frontpage</i> atas Kesalahan Data Aplikasi yang Disampaikan oleh Pemohon (Khusus Terhadap Data Yang Tidak Tercantum Dalam Sertifikat) | Per Permohonan | Rp | 150.000,00 |
| 15. Permohonan Perubahan Data Bibliografi Paten | Per Paten | Rp | 150.000,00 |
| 16. Permohonan Pembatalan Sebagian Berupa Pengurangan Klaim | Per Klaim | Rp | 100.000,00 |
| 17. Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten. | Per Permohonan | Rp | 500.000,00 |
| 18. Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi | Per Permohonan | Rp | 1.000.000,00 |
| 19. Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi | Per Permohonan | Rp | 150.000,00 |
| 20. Permohonan Lisensi Wajib | Per Permohonan | Rp | 1.000.000,00 |
| 21. Permohonan Petikan Daftar Umum Paten | Per Permohonan | Rp | 300.000,00 |
| 22. Permohonan Salinan Sertifikat Paten | Per Permohonan | Rp | 150.000,00 |
| 23. Permohonan Salinan Dokumen Paten | Per Lembar | Rp | 10.000,00 |
| 24. Biaya (Jasa) Penelusuran | | | |
| a. Permohonan atas Penelusuran Paten yang di Umumkan di Dalam Negeri | Per Subyek | Rp | 250.000,00 |
| b. Penelusuran Paten secara <i>online</i> | Per Subyek | Rp | 0,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|---------|
| 25. Biaya (Jasa) Tahunan Paten | | |
| a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah | | |
| 1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 0,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 0,00 |
| 2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 0,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 0,00 |
| 3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 0,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 0,00 |
| 4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 0,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 0,00 |
| 5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 0,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|-----------------|
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 0,00 |
| 6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 1.500.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 150.000,00 |
| 7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 2.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 200.000,00 |
| 8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 2.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 200.000,00 |
| 9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 2.500.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 3.500.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|-----------------|
| 11) Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 12) Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 13) Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 14) Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 15) Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|-----------|-----------------|
| 16) Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 17) Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 18) Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 19) Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 20) Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|-----------------|
| b. Umum | | |
| 1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 700.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 700.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 700.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 1.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 100.000,00 |
| 5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 1.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 100.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|-----------------|
| 6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 1.500.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 150.000,00 |
| 7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 2.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 200.000,00 |
| 8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 2.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 200.000,00 |
| 9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 2.500.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 3.500.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|-----------------|
| 11) Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 12) Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 13) Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 14) Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 15) Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|-----------|-----------------|
| 16) Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 17) Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 18) Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 19) Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 20) Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|---------|
| 26. Biaya (Jasa) Tahunan Paten Sederhana | | |
| a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan dan Litbang Pemerintah | | |
| 1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 0,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 0,00 |
| 2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 0,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 0,00 |
| 3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 0,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 0,00 |
| 4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 0,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 0,00 |
| 5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|-----------------|
| a) Dasar | Per Paten | Rp 0,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 0,00 |
| 6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 1.650.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 2.200.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 2.750.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 3.300.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 3.850.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|---|-----------|-------|--------------|
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp | 50.000,00 |
| b. Umum | | | |
| 1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp | 550.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp | 50.000,00 |
| 2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp | 550.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp | 50.000,00 |
| 3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp | 550.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp | 50.000,00 |
| 4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp | 550.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp | 50.000,00 |
| 5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp | 1.100.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|-----------------|
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 1.650.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 2.200.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 2.750.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 3.300.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 3.850.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|--|----------------|-------|---|
| 27. Denda Keterlambatan atas Pembayaran Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten atau Paten Sederhana | Per Paten | Rp | 2,5 % Per Bulan Dari Kewajiban yang harus dibayar |
| 28. Biaya (Jasa) Administrasi Permohonan Paten Melalui <i>Paten Cooperation Treaty (PCT)</i> | Per Permohonan | Rp | 1.000.000,00 |
| 29. Permohonan Pelaksanaan Paten Secara Regional | Per Permohonan | Rp | 3.000.000,00 |
| 30. Keterlambatan Permohonan Paten Melalui PCT Fase Nasional Dikarenakan Unsur Ketidaksengajaan (<i>Unintentional & Do Care</i>) | Per Permohonan | Rp | 5.000.000,00 |
| 31. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | | | |
| a. UMKM | Per Permohonan | Rp | 400.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan | Rp | 700.000,00 |
| 32. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | Per Permohonan | Rp | 200.000,00 |
| 33. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | | | |
| a. UMKM | Per Permohonan | Rp | 100.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan | Rp | 200.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|----------------|---------------|
| 34. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | | |
| a. UMKM | Per Permohonan | Rp 250.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan | Rp 500.000,00 |
| 35. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | | |
| a. UMKM | Per Permohonan | Rp 150.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan | Rp 250.000,00 |
| 36. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | | |
| a. UMKM | Per Permohonan | Rp 150.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan | Rp 250.000,00 |
| 37. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | | |
| a. UMKM | Per Permohonan | Rp 0,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan | Rp 200.000,00 |
| 38. Pencatatan Pengalihan Hak Rahasia Dagang | | |
| a. UMKM | Per Permohonan | Rp 200.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan | Rp 400.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|----------------|-----------------|
| 39. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang | | |
| a. UMKM | Per Permohonan | Rp 150.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan | Rp 250.000,00 |
| C. MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS | | |
| 1. Permohonan Pendaftaran Merek dan Permintaan Perpanjangan Perlindungan Merek Terdaftar | | |
| a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | |
| 1) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Kelas | Rp 500.000,00 |
| 2) Secara non Elektronik (Manual) | Per Kelas | Rp 600.000,00 |
| b. Umum | | |
| 1) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Kelas | Rp 1.800.000,00 |
| 2) Secara non Elektronik (Manual) | Per Kelas | Rp 2.000.000,00 |
| 2. Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis | | |
| 1) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Kelas | Rp 450.000,00 |
| 2) Secara non Elektronik (Manual) | Per Kelas | Rp 500.000,00 |
| 3. Perpanjangan Perlindungan Merek/Merek Kolektif terdaftar | | |
| a. Dalam jangka waktu 6 bulan sebelum/sampai dengan berakhirnya perlindungan Merek | | |
| 1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | |
| a) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Kelas | Rp 1.000.000,00 |
| b) Secara non Elektronik (Manual) | Per Kelas | Rp 1.200.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|--------------------------|-----------------|
| 2) Umum | | |
| a) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Kelas | Rp 2.250.000,00 |
| b) Secara non Elektronik (Manual) | Per Kelas | Rp 2.500.000,00 |
| b. Dalam jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan Merek | | |
| 1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | |
| a) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Kelas | Rp 1.500.000,00 |
| b) Secara non Elektronik (Manual) | Per Kelas | Rp 1.800.000,00 |
| 2) Umum | | |
| a) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Kelas | Rp 3.000.000,00 |
| b) Secara non Elektronik (Manual) | Per Kelas | Rp 4.000.000,00 |
| 4. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis | Per Permohonan | Rp 1.000.000,00 |
| 5. Permohonan Banding Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis | Per Permohonan | Rp 3.000.000,00 |
| 6. Biaya Pencatatan dalam Daftar Umum Merek | | |
| a. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek | Per Permohonan Per Nomor | Rp 300.000,00 |
| b. Pencatatan Pengalihan Hak/Penggabungan Perusahaan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif Terdaftar | Per Nomor Daftar | Rp 650.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | | TARIF |
|---|---------------------------------|----|------------|
| c. Pencatatan Perjanjian Lisensi | Per Nomor Daftar | Rp | 500.000,00 |
| d. Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek dan/atau Merek Kolektif dan/atau Indikasi Geografis | Per Permohonan Per Nomor | Rp | 200.000,00 |
| e. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif | Per Nomor Daftar | Rp | 300.000,00 |
| 7. Permohonan Petikan Resmi dan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Merek | | | |
| a. Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis | Per Permohonan Per Nomor | Rp | 200.000,00 |
| b. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai | | | |
| 1) Klasifikasi Barang dan/atau Jasa | Per Permohonan Per Kelas | Rp | 200.000,00 |
| 2) Barang dan/atau Jasa Sejenis | Per Permohonan Per Kelas | Rp | 200.000,00 |
| 3) Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar | Per Permohonan Per Nomor Daftar | Rp | 200.000,00 |
| c. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Daftar Umum Merek/Indikasi Geografis | Per Permohonan Per Nomor | Rp | 200.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|--|----------------------------|-------|------------|
| 8. Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek atau Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa | Per Permohonan Pendaftaran | Rp | 200.000,00 |
| 9. Perubahan Data pada Buku Persyaratan Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan Oleh Pemohon | Per Permohonan Per Nomor | Rp | 200.000,00 |
| 10. Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek, Merek Kolektif atau Indikasi Geografis Pada Sertifikat Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa | Per Permohonan Pendaftaran | Rp | 300.000,00 |
| 11. Biaya Salinan Bukti Prioritas Permohonan Merek | Per Permohonan Per Nomor | Rp | 300.000,00 |
| 12. Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis | Per Permohonan | Rp | 750.000,00 |
| 13. Pencatatan Perubahan Buku Persyaratan Indikasi Geografis | Per Permohonan | Rp | 200.000,00 |
| 14. Pencatatan Pemakaian Indikasi Geografis | Per Permohonan | Rp | 750.000,00 |
| 15. Pendaftaran Konsultan Kekayaan Intelektual | Per Orang | Rp | 0,00 |

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Oktober 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 31 Oktober 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 227

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan program pemerintah mengenai Kemudahan Berusaha di Indonesia terkait dengan memulai usaha, akses per kreditan, dan penyelesaian perkara kepailitan, serta untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan memenuhi perkembangan hukum, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5940